

THE URGENCY OF POLITICAL EDUCATION FOR YOUNG GENERATION IN INDONESIA

Ridwan Wijayanto Said

Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Email: ridwanwsaid@gmail.com

Abstract

The younger generation, or millennials, are made up of people between the ages of 24 and 39. Members of this generation have been assigned to vote in various parliamentary elections. Millennials are a powerful force ahead of general elections in 2024 that will enable political and party elites to win their seats in parliament and power. As a result, we provide knowledge to first-time voters through outreach and political literacy. First-time voters learn a lot from this activity, which helps them make informed decisions and avoid being swayed by political misinformation.

Keyword: Millennials, Politics, literacy.

Abstrak

Generasi muda, atau milenial, terdiri dari orang-orang yang berusia antara 24 dan 39 tahun. Anggota generasi ini telah ditetapkan untuk memilih dalam berbagai pemilihan parlemen. Generasi milenial adalah kekuatan yang kuat menjelang pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan memungkinkan elit politik dan partai memenangkan kursi mereka di parlemen dan kekuasaan. Sebagai hasilnya, penulis memberikan pengetahuan kepada pemilih pemula melalui penjangkauan dan literasi politik. Pemilih pemula belajar banyak dari kegiatan ini, yang membantu mereka membuat keputusan berdasarkan informasi dan menghindari terpengaruh oleh informasi palsu tentang politik.

Kata Kunci: Milenial, Politik, literasi

Diserahkan: 10-02-2023

Diterima: 05-03-2023

Diterbitkan: 28-03-2023

PENDAHULUAN

Di berbagai tempat, generasi milenial menjadi topik perbincangan yang banyak digemari terutama jika dikaitkan dengan perannya dalam politik. Generasi Milenial adalah mereka yang berusia antara 17 hingga 37 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa 69,38 juta orang atau sekitar 25,87 persen penduduk Indonesia adalah generasi milenial. Sebaliknya, 74,93 juta orang atau 27,94 persen dari total penduduk Indonesia termasuk dalam Generasi Z (Budiati et al., 2018). Mengingat peran mereka yang strategis sebagai penerus pembangunan bangsa Indonesia, jumlah populasi

milenial dan generasi Z yang besar sangatlah signifikan. Melihat angka tersebut, posisi kaum milenial saat ini menjadi faktor utama yang akan mempengaruhi kehidupan politik yang beradab saat ini dan di masa depan. Akibatnya, kemajuan dan keberhasilan demokrasi di tingkat daerah dan nasional antara lain dipengaruhi oleh generasi milenial. Menurut Pohan (2019), generasi milenial memiliki keterkaitan yang erat dengan informasi dan komunikasi digital, sehingga komunikasi berkembang sesuai dengan kebutuhan. Generasi pasca-milenial dan generasi milenial baru-baru ini mulai memainkan peran penting dan berkontribusi pada "politik praktis" dan "politik etis". Mereka berani terjun ke dunia politik, meski sampai saat ini *mindset* masyarakat masih mengartikan "politik itu kejam". Misalnya, banyak generasi milenial yang akan memilih anggota legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat pada Pemilu 2019.

Ada 52 caleg terpilih milenial tahun 2019 di tingkat pusat (DPR RI). Generasi milenial masih mengikuti berita politik yang bisa diakses melalui media online dan televisi, meski mereka menganggap topik politik sebagai topik yang biasa. Partisipasi politik responden juga biasanya rendah (Juditha & Darmawan, 2018). Meski banyak aktor politik muda yang mengalami kemajuan di tahun 2019, hal itu menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi. Di sisi lain, menurut Perangin-angin & Zainal (2018), lingkungan politik yang semakin terbuka tidak mampu sepenuhnya meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Secara teoritis, partisipasi politik adalah tindakan seseorang atau kelompok yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, berpartisipasi dalam pemilihan, atau mempengaruhi kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Fakta bahwa generasi milenial di era 4.0 memiliki ciri khas politik dan perilaku partisipasi politik yang menarik. Mereka sangat aktif selama sepuluh tahun terakhir menjadi bagian dari masyarakat atau segmen masyarakat yang menggunakan media sosial berbasis internet untuk merespon isu-isu politik dan paling banyak terlibat dalam kegiatan politik. Penting untuk dicatat bahwa milenial sekarang menggunakan 88,5 persen internet. Penggunaan teknologi informasi berbasis internet yang intensif oleh generasi milenial telah berkembang menjadi pola dan rutinitas yang terkadang menyita sebagian besar waktunya. Menurut Komariah & Kartini (2019), media sosial merupakan sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi dan memperluas pengetahuan seseorang, serta untuk menjalankan kampanye politik.

Saat ini, generasi muda khususnya mahasiswa lebih memilih posisi di luar kekuasaan ketika berpolitik. Sebagai penjaga moralitas politik publik, mereka terlibat dalam politik secara etis. Para mahasiswa berpendapat bahwa pilihan tersebut adalah pilihan yang baik, dan harus ada generasi muda yang memiliki kekuatan untuk mengontrol kekuasaan di setiap periode waktu. Namun, tidak ada salahnya sebagian generasi muda mulai terjun ke politik praktis untuk mempersiapkan diri dalam estafet politik bangsa. Namun, begitu generasi muda terjun ke dunia politik, jangan sampai mereka kehilangan optimisme. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, sehingga harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai

kebaikan bersama daripada saling merugikan merupakan inti dari politik. Generasi milenial perlu mengingat hal itu. Untuk mendorong terwujudnya demokrasi, generasi milenial memiliki kewajiban untuk menguasai dunia politik. Generasi milenial dituntut untuk aktif berkontribusi dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Jika Anda ingin berkontribusi untuk menjaga kondisi yang menguntungkan di wilayah Anda, jangan hanya tutup mulut. Dia mengatakan bahwa demokrasi berjalan terlalu jauh, yang merupakan masalah di negara kita, dan itu perlu diperbaiki. Oleh karena itu, agar demokrasi dapat bertahan, generasi milenial perlu dapat mengubah haluan tersebut. Menurut Rasyid et al., pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu cara untuk memperluas tri dharma perguruan tinggi dengan menyebarluaskan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan memanfaatkan literatur pustaka (buku, catatan, dan laporan) atas temuan penelitian sebelumnya mengenai peran pendidikan politik dan pendidikan antikorupsi dalam menumbuhkan perilaku antikorupsi dan kesadaran hukum di kalangan generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem politik dan demokrasi Indonesia saat ini sedang menuju pesta demokrasi lima tahunan. Pemilu adalah kesempatan penting untuk mengubah arah pembangunan bangsa untuk infrastruktur politik. Menurut Rahmadi dan Budianto (2020), tujuan partai politik di Indonesia yang terutama berkompetisi dalam pemilu lima tahunan adalah untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas melalui *political branding*. Hal ini memberikan peluang untuk menawarkan pendidikan berkualitas tinggi kepada generasi muda yang akan melanjutkan proses pembangunan bangsa di masa mendatang. Petakan potensi politik peserta untuk mengetahui bagaimana mereka melihat demokrasi Indonesia saat ini dari perspektif milenial untuk mendorong generasi muda terjun ke dunia politik. Beberapa kata kunci yang muncul dari pemetaan yang dilakukan selama kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum terarah dengan baik, apalagi menuju demokrasi substansial. Penulis juga membagi sejumlah isu yang muncul dalam demokrasi prosedural dan masih semakin kompleks, seperti pelanggaran terkait politik uang pada daftar pemilih, logistik, dan politik identitas yang masih sangat kental dan dibumbui dengan ujaran kebencian sampai dengan rekap pemungutan suara, penghitungan suara, dan manipulasi suara.

Generasi muda perlu terjun ke dunia politik untuk mengubah kondisi demokrasi saat ini yang hampir dijalankan oleh oligarki dan termasuk musim pemilu. Menurut Suhadiyanto & Lestari (2008), masyarakat demokratis tercermin dalam pemilihan yang bebas. Selain itu, para peneliti mendorong generasi milenial untuk dapat memilih apakah akan memasuki dunia kerja atau tidak, dan kemudian memutuskan demokrasi seperti apa yang kita harapkan atau inginkan. Karena generasi milenial adalah generasi

yang akan memimpin demokrasi sepuluh atau dua puluh tahun lagi. Akibatnya, masa depan demokrasi akan sangat dipengaruhi oleh peran dan kontribusi anak muda, antara lain keinginan mereka untuk menjadi penyelenggara pemilu, pasangan calon kepala daerah, atau anggota legislatif. Bidang komunikasi politik mendapat dorongan sebagai akibat dari arah material ini. Menurut Saefullah & Rezeky (2017), komunikasi politik partai politik dianggap berhasil jika pesan politik yang disampaikan melalui saluran yang dipilihnya mendapat tanggapan positif dari masyarakat atau massa berupa kesediaannya mendukung politik dengan imbalan politik legitimasi. Unsur politik bangsa, termasuk mesin politik dan konstituen politik yang dituju, memang harus berperan dalam komunikasi politik. Namun, pertanyaan tentang bagaimana memainkan peran ini dengan benar harus dipertimbangkan. Tentu saja, mereka harus menjunjung tinggi etika politik untuk memastikan bahwa proses politik dan demokrasi kita berpegang pada undang-undang dan konsensus bersama, seperti yang dikatakan Thomas Homs, sehingga kita juga dapat menghasilkan demokrasi dengan ruang partisipasi dan komunitas yang kritis. Kondisi tersebut dapat terwujud jika ada kesetaraan dalam komunikasi informasi yang sangat penting untuk mendapatkan pendidikan politik yang baik dari penyelenggara pemilu, partai politik, atau pemangku kepentingan terkait.

Neni juga mengungkapkan keyakinannya bahwa keadaan saat ini bersifat sosial. Efisiensi logistik meningkat menjadi 40,1%, tingkat partisipasi dua pemilih menjadi 82,15%, pemasangan poster di sekolah dan jejaring sosial digunakan untuk menjangkau pemilih milenial secara langsung. Oleh Mery Anggrainy (2018) mempresentasikan hasil penelitiannya tentang dampak aktivitas ekonomi, sikap apatis, kandidat yang tidak dikenal, dan informasi pemilihan yang tidak benar.

Generasi milenial perlu melakukan upaya untuk berpartisipasi dalam pendidikan politik secara berkelanjutan dengan bergabung dengan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pengalaman diri. Hal itu dilakukan secara terpadu antara lembaga suprapolitik dan elemen masyarakat sipil, termasuk semua pihak yang peduli terhadap kehidupan politik yang bersih. Karena pendidikan politik masyarakat dikatakan masih cukup rendah, terutama dalam hal literasi politik. Akibatnya, penulis percaya bahwa ini adalah masalah politik utama di Indonesia. Peran generasi muda saat ini dalam demokrasi sudah sewajarnya menjawab bahwa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi karena rakyat memiliki satu hak yang signifikan dan satu kewajiban yang signifikan. Rakyat berhak memilih perwakilan politik, termasuk presiden, wakil presiden, DPD, DPRD, dan DPR di TPS. Di sisi lain, masyarakat mengajukan banyak pertanyaan tentang perkembangan politik saat ini dan pemilu mendatang pada tahun 2024 yang dimungkinkan oleh kebebasan berdemokrasi. Metode asosiasi digunakan oleh penulis untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan kejadian aktual serta pengalaman sebagai praktisi di bidang pemerhati dan pembangunan politik nasional. Hasil penelitian Eka Budiawani sebelumnya tahun 2017 menunjukkan keberhasilan sosialisasi politik melalui agen sosialisasi politik dan materi sosialisasi politik. Berbeda dengan temuan penelitian, khususnya sukses.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2011. Menurut Undang-Undang tersebut berbunyi:

(1) Partai Politik adalah organisasi kebangsaan yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan, kehendak, dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik yang harus dilakukan partai politik tidak secara eksplisit dibahas atau diperjelas dalam undang-undang sebelumnya. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 membuat pernyataan tentang membekali generasi muda dengan pendidikan politik. Pentingnya pendidikan politik kemudian terbangun menjelang pemilu 2009. Hal ini tampak terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ketika dikaji dalam kaitannya dengan pendidikan politik. Politisi berkewajiban untuk terlibat dalam politik pendidikan dengan warga negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 12, yang menyebutkan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana:

(1) Pengajaran politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Untuk kepentingan masyarakat, terciptanya iklim yang kondusif dan perekat nasionalisme dan persatuan.

(3) Memasukkan, menyusun, dan menyalurkan aspirasi politik rakyat ke dalam pengambilan kebijakan konstitusional

(4) Partisipasi politik warga negara Indonesia.

(5) Rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sebaliknya, Dalam Bab XIII Pasal 31 ayat (1) menekankan “pentingnya pendidikan politik” yang harus diberikan oleh setiap partai politik, termasuk partai politik yang berbasis nasional, maupun oleh agama dan kewarganegaraan. Antara lain, partai politik menyelenggarakan pendidikan politik bertujuan.:

(a) meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b) meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta partisipasi politik; dan

(c) membangun karakter, kemandirian, dan kedewasaan bangsa agar tetap terjaga persatuan dan kesatuannya.

Sementara itu, fungsi partai politik sebagian besar tercakup dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang mencakup pendidikan dan rekrutmen politik.

“Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” bunyi Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang tersebut. Menurut Pasal 29 ayat (1), partai politik merekrut warga negara Indonesia untuk menjadi

- a) anggota organisasinya.
- b) pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d) calon presiden dan wakil presiden yang potensial.

Akibatnya, partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menjadi anggota dewan, pemimpin daerah, dan kepala pemerintahan. Selain itu, partai politik ada untuk memberikan pendidikan politik kepada anggota partai tersebut dan masyarakat umum. Dalam pasal 34 ayat (3) huruf b ditegaskan bahwa kegiatan berikut berkaitan dengan pendidikan politik:

- a) Memperkuat empat dasar berbangsa dan bernegara—Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Pemahaman hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pembentukan etika dan budaya politik; dan
- c) Regenerasi anggota partai politik secara bertahap dan berkesinambungan.

Firmanzah (2008) mengklaim: Dibandingkan dengan masyarakat sebelumnya, masyarakat saat ini memiliki pendidikan politik yang lebih baik dan lebih luas. Kemudahan informasi tersedia dan dapat diakses mendukung pendidikan politik. Pendidikan politik melibatkan lebih dari sekedar menyampaikan pengetahuan dan informasi di ruang kelas dan media. Menemukan informasi dan berita terkait politik dapat dengan mudah menggunakan berbagai sumber, seperti internet. Sifat media yang terbuka dan kritis juga memainkan peran penting dalam mendidik publik tentang politik.

Signifikansi pemasaran dalam politik dapat dilihat dari bagaimana pendidikan politik dapat mensosialisasikan informasi, program perdagangan, dan kebijakan pasar untuk mendapatkan penerimaan dari masyarakat. Firmzah dalam 2008:128 menunjukkan penerapan strategi pemasaran politik ke arena politik. Penggunaan pendekatan dan strategi pemasaran untuk membantu politisi dan partai politik menjadi lebih efektif dalam membangun hubungan timbal balik dengan konstituen dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien. Hubungan bisa berarti apa saja, mulai dari kontak fisik langsung selama kampanye hingga komunikasi politik tidak langsung melalui pemberitaan media. Berbagai temuan lapangan yang berkaitan dengan pendidikan politik, antara lain rekrutmen keanggotaan partai politik, kampanye, debat antar calon, penyebaran brosur dan pamflet, pemasangan spanduk dan baliho, pemasangan stiker, forum pertemuan seperti rapat umum, seminar, dan lain-lain. Klaim Norris (Firmanzah, 2008: Menurut 270), kampanye politik adalah suatu bentuk komunikasi politik di mana partai politik atau kontestan individu berusaha menyampaikan ideologi atau tawaran program kerja politik. Partisipasi dalam konferensi pers, peluncuran paket kebijakan politik, safari politik ke berbagai daerah,

pembicaraan politik di acara bincang-bincang dan radio, serta pidato politik, semuanya dianggap sebagai bentuk kampanye politik.

Pemasaran politik mencakup kampanye dengan memandang kampanye sebagai ajang manuver politik untuk memenangkan pemilu dengan jumlah pemilih sebanyak mungkin. Partai politik menggunakan janji yang seringkali tidak rasional dalam kampanye untuk mencapai “kertaraharja yang adil dan makmur” (Firmanzah, 2008: 268).

Berkaitan dengan media kampanye, Saptono (2009: 53) menyatakan bahwa media memiliki peran yang cukup signifikan dalam menyukseskan pemilu. Selain memberikan informasi, media massa juga berperan sebagai pengawas mulai dari tahapan pemilu hingga pelaksanaan pesta demokrasi berakhir.

Gambar atau foto biasanya dipajang di berbagai lokasi yang dianggap strategis menjelang pemilu atau pilkada. Oleh karena itu, sebagian besar dari apa yang digambarkan di media terdiri dari orang, sosok manusia, dan prestasi atau kegiatan yang tidak disorot. Dalam upaya meningkatkan ketenarannya bagi para calon legislatif bergaul dengan tokoh-tokoh politik terkemuka. Penulis menganalisis kedua citra tersebut, pendidikan politik lebih berfokus pada figur dan partai politik yang diidolakan daripada pada konsep dan kebijakan inti program.

Tujuan pendidikan politik adalah untuk mendidik warga negara dan anggota partai tentang politik dan membantu mereka memahaminya. Individu dalam masyarakat tidak dapat eksis tanpa ikatan dengan sistem politik. Politik merupakan jantung kehidupan bermasyarakat karena nilai-nilai politik hadir dalam kehidupan sosial berupa kekuasaan, pengaruh, otoritas, komunikasi, dan interaksi antara sejumlah orang. Partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus menyelenggarakan pendidikan politik secara lebih terarah kepada anggota dan masyarakat luas, memberikan tanggapan yang kreatif dan positif, serta mengedepankan program dan kebijakan yang jelas dan produktif. Literasi dan pemahaman politik adalah tujuan pendidikan politik, bukan berpesta, pesta pora, atau menjual janji. Bangsa yang disiplin, bertanggung jawab, patriotik, dan demokratis setidaknya dibentuk oleh pendidikan politik.

KESIMPULAN

Pemilu adalah kesempatan penting untuk mengubah arah pembangunan bangsa untuk infrastruktur politik. Dalam sistem pemilu lima tahun di Indonesia, peningkatan popularitas dan elektabilitas menjadi tujuan utama upaya *political branding* partai politik. Generasi milenial perlu melakukan upaya untuk berpartisipasi dalam pendidikan politik secara berkelanjutan dengan bergabung dengan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pengalaman diri. Hal itu dilakukan secara terpadu antara lembaga suprapolitik dan elemen masyarakat sipil, termasuk semua pihak yang peduli terhadap kehidupan politik yang bersih. Karena pendidikan politik masyarakat dikatakan masih cukup rendah, terutama dalam hal

literasi politik, maka demokrasi harus selalu dikawal oleh generasi muda yang menjadi isu politik utama di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Budiati, I., Susianto, Y., Adi, W. P., Ayuni, S., Reagan, H. A., Larasaty, P., Setiyawati, N., Pratiwi, A. I., & Saputri, V. G. (2018). Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia. www.freepik.com.
- Juditha, C., & Darmawan, J. (2018). Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milenial. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(2), 94–109. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/1628>
- Perangin-angin, L. L. K., & Zainal, M. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 737–754.
- Pohan, H. A. (2019). Kepemimpinan di Era Milenial Ditinjau dari Aspek Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan (JKPI)*, 3(2), 156–174. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JKPI/article/view/5645/2966>
- Rachmadi, R., & Budianto, H. (2020). Political Branding Tagar #2019gantipresiden Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera Di Ranah Media Sosial. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(11), 1099–1112. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i11.17057>
- Rasyid, A. U. M., Widyastuti, S., Usman, F., Zulkifli, Syafruddin, Duppa, M. T., Guntur, M., Nurfadilah, Rahmadani, Sulaiman, Masri, A., Jariah, A., Pratama, A. A., & Haryanto. (2022). Edukasi Pemanfaatan Obat Tradisional Sebagai ASI Booster. *J-Abdi*, 2(7), 5371–5379.
- Saefullah, M., & Rezeky, R. (2017). Strategi Humas Partai Gerindra dalam Membangun Citra Partai pada Pemilu 2014. *Nyimak*, 1(1), 79–105.
- Suhadiyanto, A., & Lestari, P. (2008). Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan dalam Pemilihan Kepala daerah Jawa Tengah Tahun 2008. *Forum Ilmu Sosial*, 35(2), 93–103.
- .

First publication right:

Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia

This article is licensed under:

